

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan identik dengan keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan keadaan yang serba kekurangan itu bisa menyebabkan seseorang tergoda untuk melakukan kejahatan seperti mencuri atau merampok dan sebagainya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, bersyukur adalah kuncinya. Dengan bersyukur membuat kita jauh dari kekufuran. Selain bersyukur kitapun harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup dan jangan pernah menggantungkan hidup pada orang lain dengan cara memintaminta.

Pembangunan ekonomi nasional memiliki tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja ekonomi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi semua, yang pada gilirannya mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Tak berbeda jauh dengan tujuan pembangunan tingkat nasional, tujuan pembangunan tingkat wilayah provinsi pun sama.¹

¹ Latri Wihastuti dan Henny Rahmatullah, "Upah Minimum Provinsi (UMP) Dan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa," *Jurnal Gama Societa*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2018), h. 96.

Pendapatan nasional yang tinggi serta pertumbuhan ekonomi yang cepat diperlukan dalam proses pembangunan ekonomi. Salah satu indikator untuk menilai kinerja perekonomian adalah pertumbuhan ekonomi, yang terutama menganalisis hasil pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara atau daerah.²

Menurut Amir sebagaimana dikutip oleh Romi dan Umiyati perekonomian suatu negara atau wilayah dikatakan berkembang dengan baik jika pertumbuhannya terus meningkat.³ Salah satu cara untuk melihat kinerja perekonomian secara keseluruhan adalah dengan melihat indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).⁴ Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah.⁵ Menurut Thamrin sebagaimana dikutip oleh Kuswanto dan Dewi semakin tinggi PDRB per kapita suatu

² Syahrur Romi dan Etik Umiyati, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi," *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, Vol. 7, No. 1 (Januari-April 2018), h. 1.

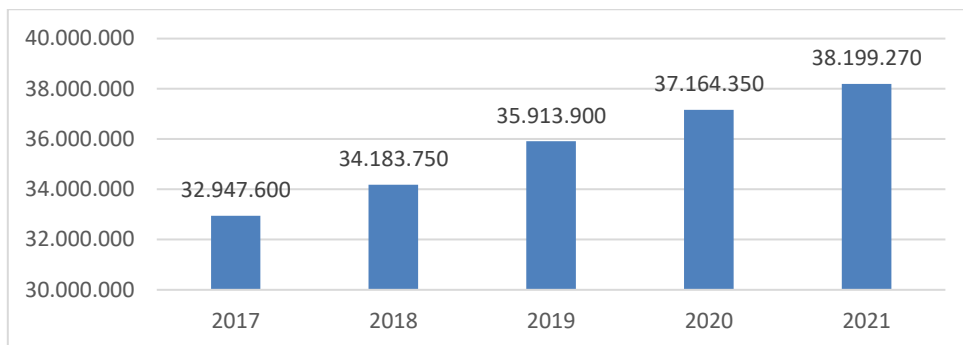
³ Ibid, h. 1-2.

⁴ Aria Bhaswara Mohammad Bintang dan Nenik Woyanti, "Pengaruh PDRB, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)," *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 33, No. 1 (Januari 2018), h. 21.

⁵ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, "Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)," <https://banten.bps.go.id/>, diakses pada 17 Nov 2022, pukul 14.00 WIB.

daerah, maka semakin besar potensi sumber penerimaannya, karena semakin besar pendapatan yang diterima masyarakat.⁶

Gambar 1. 1. Grafik PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Banten (Rupiah)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

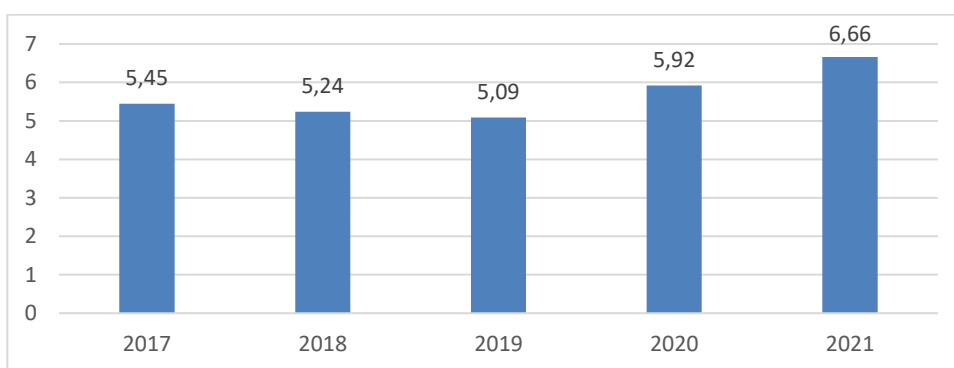
PDRB di Provinsi Banten sejak tahun 2017 hingga 2021 mengalami kenaikan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar 1.1 diatas. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Budhi seperti yang dikutip oleh Kuswanto dan Dewi, PDRB yang meningkat merupakan syarat keharusan untuk mengurangi kemiskinan. Jika PDRB mengalami peningkatan maka kemiskinan akan mengalami penurunan.⁷ Saat tahun 2017 hingga 2019 meningkatnya PDRB membuat persentase kemiskinan menurun. Namun pada tahun

⁶ Kuswanto dan Indah Giyanti Permata Dewi, "Analisis Tingkat Pendidikan, PDRB Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten," *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol. 6, No. 1 (April 2016), h. 20.

⁷ Ibid.

2020 hingga 2021 meskipun PDRB mengalami peningkatan tetapi tidak membuat persentase kemiskinan menurun seperti tahun-tahun sebelumnya, melainkan persentase kemiskinan ikut meningkat. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.2.

Gambar 1. 2. Grafik Penduduk Miskin di Provinsi Banten 2017-2021 (%)



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Kepala BPS Provinsi Banten mengatakan bahwa peningkatan angka kemiskinan tersebut disebabkan oleh pandemi covid-19 yang merebak pada Maret 2020 lalu.⁸ Menurut BPS, kemiskinan jika dilihat dari segi ekonomi didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang diukur dari sisi pengeluaran.⁹ Beberapa

⁸ “Warga Miskin Di Banten Bertambah 81.650 Orang Selama Pandemi, Ini Kata Gubernur Wahidin,” <https://regional.kompas.com> , diakses pada 20 Nov 2022, pukul 17.15 WIB.

⁹ Badan Pusat Statistik Provinsi Banten, “Kemiskinan,” <https://banten.bps.go.id/>, diakses pada 17 Nov 2022.

penyebab kemiskinan diantaranya adalah rendahnya produktifitas yang mengakibatkan pendapatan rendah (mencerminkan rendahnya PDRB per kapita). Pendapatan yang rendah akan menyebabkan tabungan dan investasi yang rendah. Investasi yang rendah akan menyebabkan akumulasi modal yang rendah, yang berarti penciptaan lapangan kerja rendah (mencerminkan tingginya pengangguran). Akumulasi modal yang rendah dikarenakan keterbelakangan dan seterusnya.¹⁰

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat tidak terlepas dari masalah kelayakan ekonomi yang rendah yang dapat dilihat dari segi pendapatan. Pendapatan dihasilkan dari upah yang ditetapkan perusahaan dengan melihat standar upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Upah minimum itu berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja dengan upah rendah dan dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, kebijakan pemerintah dalam menaikkan upah minimum juga memiliki dampak pada penanganan kemiskinan.

¹⁰ Hastina Febriaty dan Nurwani, "Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," *QE Journal*, Vol. 06, No. 03 (Desember 2017), h. 173.

Dampak bagi para pekerja dengan kenaikan upah minimum yaitu dapat memperbaiki kesejahteraannya, seperti meningkatnya daya beli yang juga akan meningkatkan semangat serta produktivitas bekerja. Lain hal dengan para pengusaha, dengan adanya kenaikan upah minimum maka mereka perlu menyesuaikan upah dengan taraf standar upah yang telah ditentukan pemerintah yang berarti biaya pengeluaran perusahaan akan bertambah. Oleh karena itu, perusahaan akan cenderung mengurangi kuantitas pekerja dalam kegiatan produksi untuk menekan biaya pengeluaran yang semakin besar. Dampak dari pengurangan kuantitas pekerja ini adalah bertambahnya pengangguran.¹¹

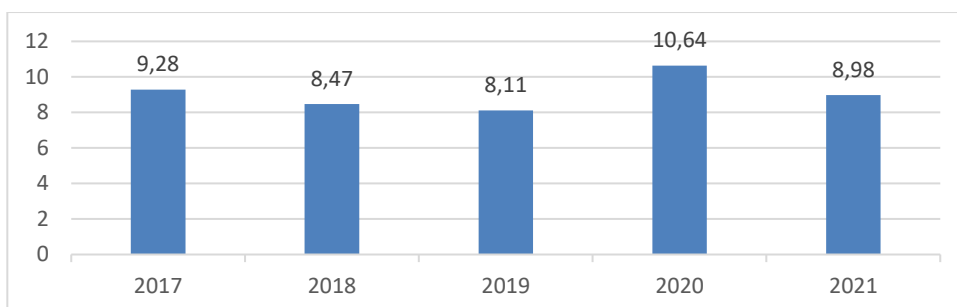
Menurut Made, dkk sebagaimana dikutip oleh Fadila menyebutkan bahwa bertambahnya pengangguran maka kemiskinan pun akan meningkat serta mengurangi tingkat pendapatan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.¹² Gambar 1.2 memperlihatkan persentase penduduk miskin di Provinsi Banten menurun dari tahun 2017 hingga 2019 lalu kembali meningkat

¹¹ Nadia Islami dan Ali Anis, "Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 3 (Agustus 2019), h. 945.

¹² Novita Putri Fadila, "Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Ketimpangan Pendapatan, Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Provinsi Jawa Timur," *Skripsi*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), h. 2.

pada tahun 2020 hingga 2021. Sedangkan pada tahun 2017 hingga 2019 tingkat pengangguran di Provinsi Banten mengalami penurunan, namun pada tahun selanjutnya mengalami kenaikan, lalu kembali turun pada tahun 2021. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.3.

**Gambar 1. 3. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
di Provinsi Banten 2017-2021 (%)**

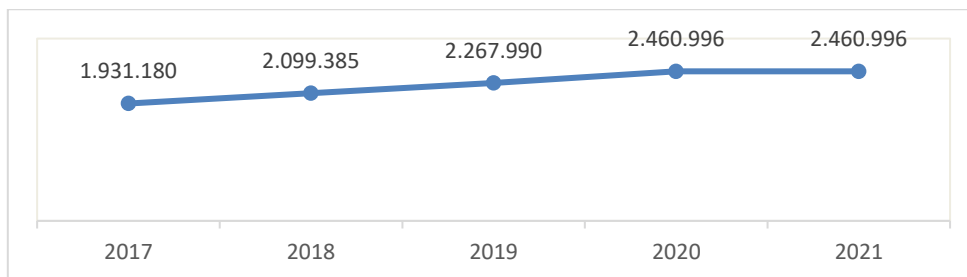


Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Grafik diatas membuktikan bahwa pada tahun 2021 ketika tingkat pengangguran turun tetapi persentase kemiskinan tidak ikut menurun, melainkan meningkat. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada seperti yang Made, dkk katakan diatas, ketika pengangguran meningkat, maka kemiskinan akan ikut meningkat serta pendapatan masyarakat akan berkurang. Pendapatan masyarakat jika dilihat dari upah minimum di Provinsi Banten

tidak berkurang, tetapi sebaliknya, yaitu bertambah setiap tahun kecuali tahun 2021 yang sama dengan tahun 2020.

**Gambar 1. 4. Grafik Upah Minimum di Provinsi Banten
Tahun 2017-2021 (Rupiah)**



Sumber: BPS Provinsi Banten, 2022

Upah minimum provinsi ini akan dijadikan standar dalam pemberian upah untuk tiap Kabupaten/Kota yang ada di Banten. Naik turunnya upah minimum yang ditetapkan pemerintah akan mempengaruhi tingkat pengangguran. Dimana pengangguran ada akibat ketidakseimbangan ketersediaan antara lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja.¹³

Penelitian Bintang dan Woyanti yang berjudul pengaruh PDRB, kesehatan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah (2011-2015), menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat

¹³ Ibid.

kemiskinan, dan tingkat pengangguran memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.¹⁴ Penelitian Sutikno, Rotinsulu dan Tumangkeng yang berjudul pengaruh upah minimum dan investasi terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, menyatakan bahwa upah minimum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap jumlah kemiskinan.¹⁵

Penelitian Sari yang berjudul pengaruh upah minimum, tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Tengah.¹⁶ Penelitian Febriaty dan Nurwani yang berjudul pengaruh gini ratio, PDRB dan tingkat inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara.¹⁷

¹⁴ Bintang dan Woyanti, "Pengaruh PDRB, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)", h. 20.

¹⁵ Rizky Yulita Sutikno, Debby Ch Rotinsulu, dan Steeva Y L Tumangkeng, "Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 19, No. 01 (2019), h. 88.

¹⁶ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskina Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium*, Vol. 10, No. 2 (2021), h. 129.

¹⁷ Febriaty dan Nurwani, "Pengaruh Gini Ratio, PDRB Perkapita Dan Tingkat Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara," h. 184.

Berdasarkan uraian dan penjelasan singkat dari beberapa penelitian terdahulu diatas maka peneliti tertarik dan ingin mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Analisis Pengaruh PDRB, Upah Minimum Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan (Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017-2021).”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang masalah sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Banten terus meningkat dari tahun ke tahun tetapi persentase kemiskinan tidak ikut turun pada tahun 2020-2021.
2. Upah minimum di Provinsi Banten meningkat secara signifikan setiap tahunnya tetapi tidak mengurangi persentase kemiskinan di tahun 2020-2021.
3. Persentase penduduk miskin di Provinsi Banten tahun 2021 terus meningkat walaupun tingkat pengangguran menurun ditahun yang sama.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam penyusunan penelitian ini tidak melebar dan meluas ke lain pembahasan, maka batasan masalah dalam penelitian ini terfokus pada pengaruh PDRB, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten yang terdiri dari 4 Kabupaten dan 4 Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017-2021.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021? Karena PDRB meningkat dari tahun ke tahun tetapi kemiskinan di Provinsi Banten terus meningkat.
2. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021? Karena upah minimum di

Provinsi Banten meningkat setiap tahunnya tetapi kemiskinan ikut meningkat.

3. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021? Karena pengangguran di Provinsi Banten meningkat saat tahun 2020 lalu menurun ditahun 2021 tetapi kemiskinan tetap meningkat walau pengangguran sudah menurun.
4. Bagaimana pengaruh PDRB, upah minimum dan pengangguran secara bersama terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021? Karena secara teori kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya PDRB, upah minimum dan pengangguran.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021.
2. Menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021.

3. Menganalisis pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021.
4. Menganalisis pengaruh PDRB, upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan sumbangan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Penelitian ini dapat memberi manfaat antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut bagi para peneliti yang meneliti dalam penelitian yang sejenis.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai catatan maupun koreksi serta acuan untuk mengambil kebijakan maupun keputusan dalam mengurangi kemiskinan.

G. Sistematika Pembahasan

BAB I adalah bab pendahuluan. Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah,

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II adalah bab kajian teoritis. Pada bab ini akan dibahas mengenai paparan teori, operasional variabel penelitian, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III adalah bab metodologi penelitian. Pada bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel, jenis metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah bab pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian tentang analisis pengaruh PDRB, upah minimum dan pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Banten tahun 2017-2021.

BAB V adalah bab penutup. Pada bab ini menguraikan penjelasan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun pihak lain yang berkepentingan.